

Pramuka Kab. Bogor Sambut Baik PWI Bentuk Gugus Dharma Pramuka

BOGOR (IM) - Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Kabupaten Bogor menyambut baik pengurus PWI Kabupaten Bogor membentuk Gugus Dharma Pramuka. Gerakan pramuka tersebut untuk pertama kali dibentuk di organisasi profesi wartawan.

"Kami mengapresiasi niat baik pengurus PWI Kabupaten Bogor yang ingin membentuk Gugus Dharma Pramuka di kalangan wartawan," kata Ahmad Kosasih, Sekretaris Kwarcab Pramuka Kabupaten Bogor di ruang kerjanya, Senin (13/9).

Ahmad Kosasih menjelaskan, Gugus Dharma adalah satuan organisasi bagi anggota dewasa, minimal usia 25 tahun atau sudah menikah yang peduli akan gerakan pramuka.

Gugus Dharma sebagai wadah pengabdian untuk memajukan Gerakan Pramuka dan berbakti pada masyarakat, bangsa, dan negara.

Lebih lanjut Kosasih mengatakan pembentukan Gugus Dharma Pramuka harus ber-

dasarkan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 176 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gugus Dharma Pramuka.

"Pengurus Kwarcab Pramuka Kabupaten Bogor merasa bangga akan kepedulian PWI Kabupaten Bogor untuk bersama-sama memajukan gerakan pramuka.

Hal itu merupakan salah satu bentuk pengabdian insan pers khususnya PWI Kabupaten Bogor kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Kosasih berharap Gugus Dharma Pramuka PWI Kabupaten Bogor segera terbentuk dan menyerahkan kepemimpinan untuk selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan dan pengesahan Gugus Dharma PWI Kabupaten Bogor.

Setelah dilantik oleh Kwarcab, Gugus Dharma Pramuka PWI Kabupaten Bogor akan dilaporkan kepada Kwarda Jawa Barat dan selanjutnya dilaporkan ke Kwartir Nasional di Jakarta. ● **gio**

Kota Tangerang Perkuat Vaksinasi Covid-19 Tingkat RW

TANGERANG (IM) - Pemerintah Kota Tangerang Banten terus memperkuat vaksinasi di tingkat RW dalam memenuhi target 1,4 juta jiwa divaksin. Saat ini, warga Tangerang yang sudah divaksin dosis pertama sebesar 967.386 orang.

Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah, di Tangerang, Senin (13/9), mengatakan, sentra vaksinasi di tingkat RW adalah upaya dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya, warga yang belum divaksin, dapat terdaftar dan segera dilakukan penyuntikan vaksin Covid-19.

"Ini bagian Pemkot Tangerang membentuk kekebalan komunal," kata Arief saat meninjau PTM di SMP Negeri 25, Senin (13/9).

Berdasarkan data, target vaksinasi di Kota Tangerang sebesar 1.479.301 orang. Untuk dosis pertama yang sudah disuntik hingga tanggal 12 September 2021 sebanyak 967.386 orang dan dosis kedua yakni 579.287 orang.

Data tersebut, lanjut Wali Kota, masih akan terus diperbarui. Pasalnya, banyak juga warga Kota Tangerang yang melaksanakan vaksinasi diluar kota seperti Jakarta, Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan dan daerah lain.

"Jadi ketika warga Kota Tangerang melakukan vaksinasi diluar kota maka datanya akan masuk daerah tersebut. Sementara pemkot mendata warga yang divaksin di sentra - sentra vaksin yang data basenya masuk ke Pemkot. Ini yang kita sinkronkan dengan pemerintah pusat," katanya.

Dinas Kesehatan Kota Tangerang telah mencanangkan bulan vaksinasi dengan melaksanakan kegiatan program ini. Pendaftaran juga bisa melalui online melalui kanal vaksinasi.tangerangkota.go.id. ● **pp**

8 | Nusantara



JALAN RUSAK DI KABUPATEN BOGOR

Sejumlah kendaraan melintasi jalan yang rusak di Jalan Raya Bojong Gede - Pabuaran, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (13/9). Kondisi jalan yang rusak tersebut dapat membahayakan pengendara serta membuat arus lalu lintas terhambat.

Gandeng IPB University, Pemkab Bogor Dirikan SPD

Dengan adanya program Sekolah Pemerintahan Desa, program desa membangun di Kabupaten Bogor semakin tepat sasaran dan efektif, demi tercapainya masyarakat desa yang maju, mandiri dan sejahtera serta terwujudnya visi Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban, kata Bupati Bogor, Ade Yasin

BOGOR (IM) - Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor menggandeng IPB University mendirikan Sekolah Pemerintahan Desa (SPD). SPD adalah sekolah tentang pemerintahan desa di Indonesia dan

Kabupaten Bogor 2021 menjadi pelopor sebagai peserta angkatan pertama di Indonesia.

Sekolah tersebut diresmikan, Bupati Bogor, Ade Yasin bersama IPB University, di Auditorium Setda Kabupaten Bogor, Senin (13/9).

Momen ini, sekaligus dilaksanakan penganugerahan pemenang lomba video profil desa.

Hadir secara langsung pada acara tersebut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor,

M. Romli, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, dan unsur Forkopimda serta Kepala Desa nominator penerima anugerah lomba video profil desa.

Sedangkan, Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Bogor mengikuti acara tersebut secara virtual.

Dalam kesempatan itu, Ade Yasin menegaskan, Pemkab Bogor berupaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat desa tentang tata kelola pemerintahan desa di era digital.

Dinamika dan perencanaan pembangunan berbasis data sensus, partisipatif dan spasial. Nantinya para aparat desa ini akan didampingi oleh tenaga pengajar profesional serta kompeten dari IPB University.

"Selain prestisius, program sekolah pemerintahan desa diharapkan akan membawa perubahan besar menuju tata

kelola pemerintahan desa di era digital yang jauh lebih maju dan lebih baik," tandas Ade Yasin.

Orang nomor satu di Pemkab Bogor, menilai permasalahan pembangunan di desa selama ini adalah terbatasnya informasi, pengetahuan, teknologi dan kapasitas SDM aparat desa yang terdiri dari, 40 kepala desa yang berasal dari 39 kecamatan. Masing-masing berdasar dari yang akurat dan presisi sehingga banyak program pembangunan desa menjadi tidak tepat sasaran.

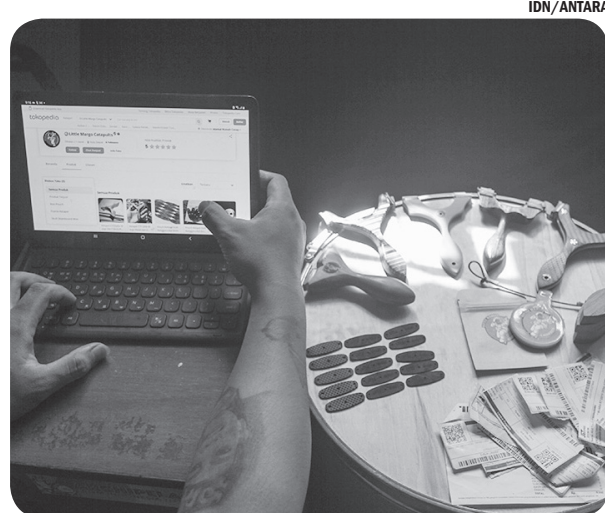
"Semoga dengan adanya program Sekolah Pemerintahan Desa, program desa membangun di Kabupaten Bogor semakin tepat sasaran dan efektif, demi tercapainya masyarakat desa yang maju, mandiri dan sejahtera serta terwujudnya visi Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban," kata Bupati Bogor, Ade Yasin.

Selanjutnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah menerangkan, Sekolah Pemerintahan Desa akan menjadikan data desa presisi sebagai bahan

praktikum. Data presisi dikumpulkan dengan teknologi 4.0, berbentuk data citra desa dengan resolusi tinggi hingga 5 cm plus data numerik dan deskriptif sehingga memiliki tingkat akurasi tinggi untuk menggambarkan potensi desa.

"Sekolah Pemerintahan Desa tahun 2021 ini akan berlangsung hingga bulan Desember. Sekolah ini diikuti oleh total 120 peserta yang terdiri dari, 40 kepala desa yang berasal dari 39 kecamatan. Masing-masing berdasar dari yang akurat dan presisi sehingga banyak program pembangunan desa menjadi tidak tepat sasaran.

"Mudah-mudahan apa yang sudah diusung oleh Bupati Bogor ini, menjadi bagian penting sebagai contoh keteladanan yang dapat ditiru untuk pembangunan desa-desa di Indonesia," jelasnya. ● **gio**



IDN/ANTARA

UMKM GO DIGITAL DI JAWA BARAT

Perajin ketapel mengecek produknya pada aplikasi perdagangan elektronik (e-commerce) di Little Margo Catapult, Depok, Jawa Barat, Senin (13/9). Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pertumbuhan ekonomi kreatif pelaku usaha berbasis digitalisasi di Jawa Barat mengalami pertumbuhan 40 persen di tengah pandemi Covid-19.

MESKI BIAYA MENINGKAT

Animo Pendaftaran Umrah di Tangel Mulai Menggeliat

TANGSEL (IM) - Menujunya angka penularan Covid-19 di Kota Tangerang Selatan, membawa angin segar bagi masyarakat untuk menjalani aktivitasnya. Termasuk, dalam menunaikan ibadah umrah.

Seiring dengan penurunan tren kasus tersebut, animo pendaftaran umrah di wilayah termuda se-Banten ini, kini mulai menggeliat.

Hal itu dipaparkan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Tangsel, Abdul Rojak, Senin (13/9). "Terkait dengan umrah, perlu saya sampaikan bahwa di Tangsel khususnya sudah menggeliat," ujar Rojak saat diwawancarai.

Menurutnya, sejak kasus melandai ini warga Tangsel mulai mendaftarkan dirinya melalui biro perjalanan umrah.

Kendati demikian, jumlahnya masih belum sebanyak pendaftaran saat kondisi masih normal.

"Masih dalam skala kecil yang sudah merencanakan untuk pelaksanaan pemberangkatan umroh. Jadi memang tidak sebanyak di waktu normal, tapi sudah mulai ada dalam skala kecil masyarakat yang melaksanakan ibadah umroh," terang Rojak.

Selain dengan kasus yang melandai, kata Rojak, animo pendaftaran umrah ini juga ter-

lihat sejak Kerajaan Arab Saudi telah kembali membuka keran perizinan untuk beribadah umrah di wilayahnya.

"Artinya ketika Pemerintah Arab Saudi sudah mulai membuka kemudian disambut oleh para biro perjalanan travel haji dan umrah. Tentu yang akan berangkat umrah harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan," terangnya.

Namun, kata Rojak, untuk biayanya kini justru mengalami kenaikan.

"Ya, kalau yang normal kita bisa hitung estimasinya dari mulai terendah Rp20-25 juta, peningkatan ya cukup tajam sudah di angka Rp40 juta. Ya, itu biaya di masa pandemi, mungkin bisa mencapai Rp60 juta," katanya.

Pasalnya dalam keberangkatan kali ini, diperlukan sejumlah kebutuhan tambahan yang menyangkut dengan protokol kesehatan.

"Ya ada karena item untuk protokol kesehatan itu dimasukkan ke dalam biaya perjalanan ibadah umrah, termasuk nanti isolasi dan lain sebagainya itu masuk di dalamnya. Baik ketika berangkat, atau ketika pulang. Jadi memerlukan pembiayaan untuk kesehatannya," pungkasnya. ● **pp**

DPRD Bogor Dorong Program Penebusan Ijazah Gratis untuk Warga Miskin

BOGOR (IM) - Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PDI Perjuangan, Atty Soemadikarya mendorong program penebusan ijazah gratis bagi warga miskin Kota Bogor ijazah baik itu SD, SMP dan SMA/SMK.

Hal ini didasarkan banyaknya laporan dari masyarakat terkait sulitnya menebus ijazah karena keterbatasan ekonomi. Bahkan program penebusan ijazah gratis bagi masyarakat miskin ini didukung oleh Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim.

"Kami segera tuntaskan persoalan ini. Banyak masyarakat yang mengeluh karena banyak sekolah yang menahan ijazah dengan judul yang sama yaitu tertunggaknya kewajiban orang tua siswa dalam melunasi biaya," ungkap Atty, Senin (13/9) pagi.

Atty menegaskan, penebusan ijazah harusnya bisa dilakukan secara gratis dengan mengacu pada peraturan wali kota (perwali).

"Berdasarkan data, yang menunggak tak bisa ambil ijazah hampir di atas 90 persen. Ini tentu harus diperjuangkan," tegasnya.

Atty melanjutkan, adanya komitmen dari Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim sangat diapresiasi dirinya.

Menurutnya, Pemkot Bogor sejauh ini sudah berupaya hadir di tengah masyarakat. Upaya memprioritaskan pendidikan di Kota Bogor, harus didukung penuh oleh legislatif.

"Harusnya tidak hanya pemkot saja yang melakukan intervensi. Gubernur Jawa Barat seharusnya ikut melakukan intervensi dalam APBD Provinsi untuk persoalan ini karena jenjang SMK/SMA sudah menjadi ranah provinsi," terangnya.

Atty menambahkan, DPRD Kota Bogor mendesak Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk bisa terlibat dalam program ini. Menurutnya, intervensi APBD Provinsi untuk penebusan ijazah sangat diperlukan khususnya Kota Bogor.

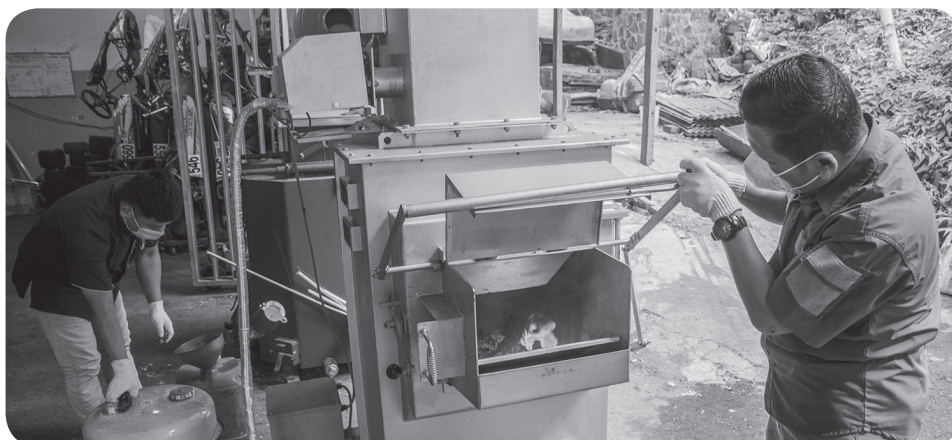
"Saya meminta kepada Gubernur Jabar, harusnya dapat ikut dalam program ini di mana adanya intervensi APBD Provinsi untuk diberikan kepada daerah khususnya ke

Kota Bogor. Supaya tidak ada lagi cerita ijazah siswa yang sudah lulus masih ditahan karena adanya tunggakan orang tua siswa, sementara sekolah SMA dan SMK yang dalam ranah ini merupakan kewenangan dinas pendidikan tingkat provinsi malah terlihat tidak peka," tambahnya.

Atty juga mengatakan, selain sorotan terkait penebusan ijazah, dirinya menampung sejumlah aspirasi antara lain migrasi BPJS-PBI bagi masyarakat tidak mampu, selain itu tentang pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang bantuan hukum bagi warga miskin.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim merespons positif dengan niatan para legislator. Dirinya berjanji akan menuntaskan eksekusi persoalan ini dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor.

"Kami akan hadir dan selesaikan persoalan ini secepatnya. Tiga hak dasar rakyat salah satunya pendidikan dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin memang menjadi prioritas kami," pungkasnya. ● **gio**



IDN/ANTARA

PENGEMBANGAN MESIN PENGOLAH SAMPAH DI BANDUNG

Tim teknis mengoperasikan prototype mesin pengolah sampah di Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan - Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Senin (13/9). Tim gabungan dosen dan mahasiswa tersebut mengembangkan mesin pengolah sampah anorganik yang merupakan hibah dari Jepang untuk didesain dengan kapasitas setengah hingga satu meter kubik yang ramah emisi untuk kedepannya diharapkan bisa digunakan hingga tingkat RW di Kota Bandung.

Kemenhub Kaji Pembatasan Penumpang di Kawasan Puncak

BOGOR (IM) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengkaji pemberlakuan kebijakan dua lapis (layer) di kawasan aglomerasi Puncak, Bogor, pada akhir pekan. Artinya penerapan permanen ganjil genap (gagc) dan pembatasan penumpang kendaraan. Pembatasan ini untuk mengatasi kepadatan dan kemacetan arus lalu lintas yang kerap terjadi.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan pemberlakuan ganjil genap masih menunjukkan adanya kemacetan dan perlu dikaji juga pembatasan penumpang maksimal "4 in 1". "Artinya kalau ganjil genap dilakukan, volume atau kapasitas kendaraan masih juga tinggi sehingga penggunaan jalan masih terganggu juga, ya kami akan gunakan layer kedua," kata Budi Setiyadi saat menyaksikan langsung arus lalu lintas di Puncak, Bogor, Minggu (12/9).

Budi mengatakan layer satu berarti penerapan ganjil genap terpadu di kawasan aglomerasi Puncak seperti biasa. Akan tetapi, ketika volume kendaraan masih kurang terkendali maka layer dua, yakni "4 in 1" juga akan diberlakukan. "4 in 1 berarti satu mobil dibatasi empat orang, mungkin seperti itu," ujarnya.

Kemenhub, katanya, pada pekan ini akan berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, termasuk Polres Bogor, Polresta Bogor, Polres Cianjur, Polres Sukabumi, Polres Sukabumi Kota bersama Polda Jabar. Selain itu juga dengan Bupati Bogor, Ade Yasin dan melibatkan dengan unsur masyarakat Bogor ngahiji ada 25 orang perwakilan. Sambil melakukan pengembangan regulasi itu, penerapan ganjil genap bisa tetap dilaksanakan jika diperlukan.

"Regulasi kita kembangkan, uji coba kalau memang masih kurang bisa kita lakukan kembali, tetapi mudah-mudahan karena sudah koordinasi dengan masyarakat sekitar Puncak yang mungkin mempunyai kepentingan terhadap

kebijakan menekan penyebaran Covid-19 ini dan masyarakatnya juga akan kami libatkan," katanya.

Sementara itu, kata Budi, penerapan ganjil genap terpadu pekan pertama terkendala sosialisasi, sehingga masih ada masyarakat yang menunggui di gerbang tol untuk melihat waktu kosong pemeriksaan, apalagi sampai mencari jalan tikus atau jalur alternatif untuk menerobos ganjil genap. "Dari Polri, saat ini sudah mengantisipasi. Masalahnya masyarakat banyak belum tahu sehingga menghambat lalu lintas yang mana yang boleh naik ke atas," ujarnya.

Sementara, Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Dicky Anggi Pranata mengatakan, hasil pantauannya di lapangan, arus lalu lintas masuk ke arah Puncak berkurang 20 hingga 30 persen. Jumlah kendaraan yang masuk ke arah Puncak dan diputar balik petugas pun berkurang pada pekan kedua.

Berdasarkan data dari petugas, pada pekan pertama uji coba ganjil-genap, petugas memeriksa 27.894 kendaraan dan memutar balik kendaraan sebanyak 19.103. Sedangkan, pada pekan kedua, jumlah kendaraan yang akan masuk Puncak dan diperiksa sebanyak 6.024 dan ada 4.222 kendaraan diputar balik.

"Artinya sudah banyak masyarakat yang paham, di mana beberapa pekan ini sejak pelaksanaan ganjil-genap memang melakukan penyampaian informasi secara masif," ujarnya.

Lebih lanjut, Dicky mengatakan, sebelum aturan uji coba ganjil-genap dicabut, petugas gabungan masih tetap terapkan uji coba lagi. Dia pun menyampaikan, Direktur Jenderal Hubdat Kemenhub sempat berkunjung untuk berkomunikasi terkait kondisi uji coba ganjil-genap di lapangan seperti apa.

"Ini dalam rangka perumusan Peraturan menteri kedepannya. Sebagai aturan yang akan menaungi pelaksanaan ganjil-genap di Puncak," ucapnya. ● **pra**